

KEKUASAAN POLITIK MENURUT PEMIKIRAN BUYA HAMKA

Ikram Ari Zona

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Email: ikramarizona@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze Buya Hamka's views on political power and how these views are reflected from the Islamic perspective which is the basis of his thinking. The research method used is a descriptive-analytical method with a qualitative approach. Data was obtained through literature study, by examining various writings and thoughts of Buya Hamka that were relevant to the research theme. The results of the analysis show that in Buya Hamka's view, political power must be exercised by paying attention to Islamic moral and ethical values. For him, political power is a trust that must be accounted for before Allah SWT and is faced with the public interest and welfare of society. Buya Hamka emphasized that political power must be used for the common good, not for personal interests or certain groups. In the Islamic perspective he adheres to, Buya Hamka emphasizes the principles of justice, truth and balance in the management of political power. He also emphasized the importance of openness, accountability and public participation in the political process. These thoughts made an important contribution to the formation of Islamic political insight in Indonesia. In conclusion, Buya Hamka's thoughts on political power emphasize the importance of applying Islamic values in carrying out political affairs. This view is relevant to consider in the context of Indonesia's current political dynamics, where Islamic values are often an integral part of the political and social order of society.

Keywords: *Power, Politics, Buya Hamka*

PENDAHULUAN

Di dunia Islam, ada tiga aliran pemikiran mengenai hubungan antara agama dan politik. Pertama, kelompok ini meyakini Islam adalah agama komprehensif yang memuat aturan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sistem ketatanegaraan. Kedua, Islam sebagai inspirasi sekte ini berpendapat bahwa agama dapat menjadi sumber inspirasi tindakan politik tetapi tidak boleh secara langsung mengendalikan atau mengatur politik; dan ketiga, karena sekte ini umat Islam percaya bahwa agama harus berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik. . Mereka berpendapat bahwa agama dapat memberikan pedoman moral dan hukum yang harus diikuti ketika membentuk kebijakan dan undang-undang publik (Munawir Sjazali, 1993)

Di negara berpenduduk mayoritas Muslim, yaitu Indonesia, keterlibatan agama dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan masyarakat menjadi semakin penting, termasuk membangun kemungkinan adanya keterkaitan antara agama dan politik. Hubungan antara agama dan politik di Indonesia adalah kisah permusuhan dan saling curiga. Hubungan tidak bersahabat ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat di antara para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebagian besar beragama Islam mengenai mau dibawa kemana bangsa ini. Masalah yang paling penting adalah apakah negara tersebut Islamis atau nasionalis. (Mohammad Natsir, 1973) Pembangunan awal bangsa mengharuskan Islam diakui dan diterima sebagai dasar ideologi nasional. Konstruksi kedua, sebaliknya, menyerukan agar negara berlandaskan Pancasila sebagai ideologi nasional.

Politik Islam selalu bertumpu terutama pada Al-Qur'an dan Hadits, serta berpedoman pada pemerintahan Nabi di Madinah dan Kulafa al-Rasiyadun sebagai implementasi kebijakan Islam. Al-Qur'an adalah petunjuk dan petunjuk bagi semua orang, tidak hanya umat Islam sendiri, dan juga menjadi pembeda antara yang haq dan yang hak dan batil sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an surah Al Baqarah 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

Artinya: *Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).* (Kementerian Agama RI, 2012)

Penafsiran Al-Qur'an dalam konteks politik memang menjadi salah satu aspek penting dalam pemahaman ajaran Islam, terutama dalam konteks negara yang memiliki masyarakat majemuk seperti Indonesia. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) adalah salah satu ulama terkemuka Indonesia yang memberikan kontribusi besar dalam bidang penafsiran Al-Qur'an dan pemikiran Islam. Tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Hamka merupakan salah satu karya terkenalnya yang memberikan penjelasan mendalam tentang berbagai ayat Al-Qur'an dan prinsip-prinsip Islam secara umum. Dalam tafsirnya, Hamka juga mengupas berbagai masalah, termasuk yang berkaitan dengan kekuasaan politik dan kepemimpinan.

Indonesia, sebagai negara majemuk, dihadapkan pada tantangan besar dalam membangun kesatuan dan harmoni di tengah keragaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Konsep majemuk atau pluralitas menjadi kenyataan yang harus diakui dan dihadapi dengan bijak, terutama dalam konteks globalisasi yang semakin menghubungkan masyarakat dunia. Dalam konteks ini, pemahaman Islam yang inklusif dan toleran seperti yang diajarkan oleh Hamka dan ulama-ulama lainnya menjadi sangat relevan. Pemimpin dan pemegang kekuasaan politik di Indonesia diharapkan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan, toleransi, dan kebersamaan dalam menjalankan tugas mereka, sehingga dapat memelihara kerukunan dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Dengan memahami nilai-nilai Islam yang menghargai keragaman dan mengedepankan keadilan, diharapkan Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengelola pluralitas dan membangun masyarakat yang harmonis dan damai, meskipun dihadapkan pada perbedaan-perbedaan yang ada. (Katimin, 2010)

Pemikiran dan pandangan Buya Hamka tentang kekuasaan politik memiliki signifikansi penting dalam konteks pemahaman agama dan politik di dunia Islam. Sebagai seorang ulama terkemuka dan cendekiawan Islam dari Indonesia,

Buya Hamka telah memberikan kontribusi yang berharga dalam menggali pandangan Islam yang komprehensif terkait hubungan antara agama dan politik. Dalam konsepsi Hamka, Al-Qur'an tidak hanya dianggap sebagai kitab suci yang berfokus pada urusan spiritual dan ritual, tetapi juga memberikan panduan komprehensif untuk setiap aspek kehidupan manusia, termasuk politik. Pemikiran politik Hamka dibangun di atas paradigma ketidak-terpisahan agama dengan politik-kenegaraan, di mana agama dianggap sebagai pondasi negara.

Meskipun Islam tidak secara rinci menentukan konsep negara dan pemerintahan, Hamka meyakini bahwa umat Islam memiliki kewajiban untuk berjihad dalam menentukan pilihan politiknya sesuai dengan kebutuhan zamannya. Baginya, yang terpenting bukanlah bentuk negara atau pemerintahan, tetapi bagaimana negara itu dikelola sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ajaran Islam dijadikan sebagai sumber hukum. Dengan paradigma tersebut, Hamka menolak gagasan sekularisme dan komunisme. Terhadap konsep hak asasi manusia (HAM) yang dirumuskan oleh PBB, ia bersikap selektif, menerima sebagian besar dan menolak sebagian kecil, terutama terkait kebebasan berpindah agama dan nikah antaragama. Hamka juga berupaya menyelaraskan konsep demokrasi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ia menolak demokrasi sekuler yang memisahkan agama hanya pada ranah privat, dan mengembangkan konsep demokrasi Islam yang disebutnya sebagai "Demokrasi Takwa". Konsep demokrasi model Hamka ini didasarkan pada tiga hal penting: manusia sebagai khalifah Allah, musyawarah, dan masyarakat yang bertakwa.

Dalam karya-karyanya yang terkenal seperti "Tafsir Al-Azhar" dan "Perkembangan Ummat Islam", Buya Hamka menggali dan menyajikan pandangannya tentang kekuasaan politik dengan landasan yang kuat dari Al-Qur'an dan hadis. Beliau menyoroti berbagai aspek yang berkaitan dengan kepemimpinan yang adil, etika politik, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta konsep-konsep penting dalam politik Islam. Dalam jurnal ini, akan dilakukan analisis mendalam terhadap pemikiran Buya Hamka mengenai kekuasaan politik. Kajian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan Buya Hamka tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya bertindak, bagaimana hubungan antara kekuasaan dan moralitas Islam terbentuk, serta bagaimana konsep-konsep politik Islam direkonstruksi

dalam pemikirannya.

Dengan memahami pemikiran Buya Hamka tentang kekuasaan politik, diharapkan kita dapat memperkaya wawasan dan perspektif kita tentang bagaimana Islam memandang dan mengatur urusan politik, serta bagaimana pemahaman tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks masyarakat yang beragam dan dinamis seperti Indonesia. (Setiawan, 2009)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau topik tertentu. Penelitian ini menekankan pada deskripsi, interpretasi, dan pemahaman mendalam tentang karakteristik, konteks, dan makna dari fenomena yang diteliti. Fokus utamanya adalah pada pengumpulan data yang kaya dan mendalam, serta penafsiran subjektif terhadap data yang dikumpulkan (Meleong, 2000). Dalam konteks penelitian politik, pendekatan politik digunakan untuk menjelaskan permasalahan politik dan untuk menemukan atau menafsirkan pengetahuan politik baru yang dihasilkan oleh para ilmuwan politik (Mestika, 2008). Dengan demikian, pendekatan politik dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuasaan politik, etika politik, kepemimpinan, dan hubungan antara agama dan politik, dengan fokus pada pandangan Buya Hamka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pemikiran Buya Hamka mengenai kekuasaan politik dalam konteks Islam dan masyarakat Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Buya Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka, adalah seorang ulama dan intelektual Islam yang lahir di desa Tanah Sirih, kenagarian Sungai Batang, tepi Danau Maninjau, pada tanggal 14 Muharam 1326 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 17 Februari 1908. Beliau tumbuh

dalam lingkungan keluarga yang taat beragama, yang dipimpin oleh ayahnya, Syekh Abdul Karim Amrullah, seorang tokoh agama yang terhormat. (Hamka, 1979)

Ibu Buya Hamka, Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria, adalah seorang yang terkenal dalam bidang seni dan memiliki peran penting dalam masyarakat Minangkabau. Beliau adalah istri ketiga dari HAKA, dan dari pernikahan ini, Buya Hamka menjadi salah satu dari empat anak yang lahir, bersama dengan Abdul Kudus, Asman, dan Abdul Muthi. Buya Hamka berasal dari keturunan yang taat beragama dan memiliki keterkaitan dengan gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. (Samsul Nizar, 2008)

Pendidikan awal Buya Hamka dimulai ketika dia dibawa oleh ayahnya ke Padang Panjang pada usia enam tahun. Pada usia tujuh tahun, dia mulai belajar di sekolah desa dan malam hari dia belajar mengaji dengan ayahnya sendiri hingga menghafal Al-Qur'an. Selama periode 1916 hingga 1923, dia belajar agama di sekolah-sekolah seperti Diniyah School dan Sumatera Thawalib di Padang Panjang yang dipimpin oleh ayahnya sendiri. Meskipun pendidikan ini diawali dengan disiplin yang keras, Buya Hamka tumbuh menjadi seorang intelektual yang produktif dan cendekiawan Islam yang berpengaruh. Buya Hamka dikenal sebagai penulis yang sangat produktif dan multifaset. Karyanya meliputi berbagai genre, termasuk sejarah, filsafat, akhlak, tafsir, dan sastra. Dia diakui sebagai salah satu penulis Roman Indonesia yang paling produktif yang mengangkat tema-tema Islam, serta telah menghasilkan beberapa karya yang memiliki nilai sastra yang tinggi.

2. Aktivitas Politik Buya Hamka

Buya Hamka, selain dikenal sebagai seorang ulama dan intelektual, juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik yang membentuk perjalanan panjang perannya dalam sejarah Indonesia. Aktivitas sosial-politiknya dimulai ketika ia kembali dari Jawa dan terlibat dalam pendirian Tabligh Muhammadiyah di Padang Panjang, Sumatera Barat, bersama Kakak Iparnya, AR. Sutan Mansur.

Keterlibatannya dalam Muhammadiyah semakin berkembang, mencapai puncaknya pada Kongres ke-32 di Purwokerto tahun 1953, di mana ia terpilih sebagai anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Keterlibatannya dalam Muhammadiyah berlanjut hingga kongres-kongres selanjutnya di berbagai kota Indonesia, meskipun pada kongres di Makassar tahun 1971, beliau tidak lagi bersedia untuk aktif karena alasan kesehatan dan usia, namun tetap diangkat sebagai penasehat Muhammadiyah hingga wafat.

Selain Muhammadiyah, Buya Hamka juga terlibat dalam kelompok diskusi Ikhwanus Shafa, yang terdiri dari para intelektual Medan, dan juga terlibat dalam Lembaga Bahasa Indonesia. Aktivitas politiknya semakin meluas, dimana beliau aktif dalam partai Masyumi dan di Front Pertahanan Nasional (FPN) sebagai ketua. Posisi ini membawanya berkeliling daerah terutama wilayah Sumatera untuk membangkitkan semangat juang rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan.

Aktivitas politiknya mencapai puncaknya pada pemilu tahun 1955, di mana Buya Hamka mewakili daerah Jawa Tengah dan terpilih sebagai anggota Konstituante. Keterlibatannya dalam Masyumi bahkan membuatnya mundur dari jabatan sebagai PNS di Departemen Agama. Namun, pada tahun 1964, Buya Hamka ditangkap dan menjadi tahanan politik pemerintahan Orde Lama (Presiden Soekarno) hingga tahun 1966. Setelah dibebaskan, beliau kembali aktif berdakwah di Masjid Al Azhar dan menerbitkan kembali Majalah Panji Masyarakat pada tahun 1967. Perjalanan panjang Buya Hamka dalam aktivitas sosial dan politik merupakan cerminan dari komitmen dan dedikasinya untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perannya tidak hanya sebagai seorang pemimpin agama, tetapi juga sebagai seorang aktivis dan pemikir yang terlibat dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

3. Landasan Kekuasaan Politik Dalam Al-qur'an

Kekuasaan, sebagai elemen sentral dalam dinamika sosial, merupakan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dan menolak pengaruh yang tidak diinginkan. Dalam konteks politik, kekuasaan memainkan peran

penting dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang memengaruhi warga negara atau penduduk suatu wilayah. Oleh karena itu, kekuasaan politik tidak hanya mencakup pembentukan kebijakan, tetapi juga pengaruh terhadap tindakan dan aktivitas negara di berbagai bidang, seperti administratif, legislatif, dan yudisial.

Legitimasi merupakan faktor penting dalam menjaga kestabilan dan keberlanjutan kekuasaan. Legitimasi mengacu pada pengakuan atau persetujuan dari masyarakat atau warga negara terhadap otoritas dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah atau pemimpin. Tanpa legitimasi, kekuasaan cenderung rentan terhadap perlawanan atau ketidakpatuhan dari masyarakat yang dipimpin.

Dalam perspektif Islam, gagasan tentang kepemimpinan dipandang sebagai hal yang positif dan diperlukan untuk memelihara tatanan sosial yang adil dan berkeadilan. Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya ditujukan untuk memperoleh kepatuhan dari masyarakat, tetapi juga untuk memastikan penerapan nilai-nilai moral dan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pemahaman tentang kekuasaan politik dalam konteks Islam menekankan pentingnya menjaga legitimasi, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan memastikan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan kekuasaan politik. Sebagaimana firman Allah dalam quran surah Al-Imran ayat 26;

قُلِ اللَّهُمَّ مِلْكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Katakanlah (Muhammad), "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. (Q. S Al-Imran ayat 26)

Kekuatan berasal dari Allah - ini adalah konsep Islam yang digariskan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menegaskan bahwa segala bentuk kekuasaan politik,

baik pada tingkat individu maupun nasional, berasal dari Allah. Allah diyakini sebagai sumber kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu di alam semesta. Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah adalah pemilik sejati semua kerajaan dan kekuasaan. Hal ini juga mengingatkan umat Islam untuk selalu berusaha menjaga keseimbangan antara kewibawaan dan ketaatan kepada Allah dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam quran surah An-Nisa ayat 58 yaitu yang berbunyi;

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنَّ تَوَدُّوا الْأَمْنَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِصِرَاتٍ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَن سَمِيعًا

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

Keadilan adalah prinsip fundamental dalam Islam yang ditekankan dalam Al-Qur'an sebagai landasan bagi kekuasaan politik. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan politik dan perlakuan terhadap individu dan kelompok. Surat An-Nisa ayat 58 merupakan salah satu contoh ayat yang menekankan pentingnya keadilan dalam menyelesaikan perselisihan, menegakkan hukum, dan menangani isu sosial dan politik.

Keadilan dalam Islam mencakup berbagai aspek, seperti perlakuan yang adil terhadap individu dan kelompok, penegakan hak asasi manusia, distribusi sumber daya yang adil, dan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Pemimpin Muslim diharapkan menjadi teladan dalam menerapkan keadilan dalam keputusan dan tindakan mereka, termasuk dalam penegakan hukum yang adil dan memberikan keadilan kepada rakyat yang mereka pimpin. Al-Qur'an juga menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam hubungan sosial dan ekonomi. Islam mendorong umat Muslim untuk berbagi kekayaan dengan adil, memberikan hak yang setara kepada semua anggota masyarakat, dan menjaga keadilan dalam perdagangan dan kontrak bisnis. Dalam pandangan Islam, keadilan bukan hanya tanggung jawab pemimpin, tetapi juga semua umat Muslim. Setiap individu diharapkan

untuk berperilaku adil, menghormati hak-hak orang lain, dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

1. Tafsir Ayat-Ayat Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an Menurut Pemikiran Hamka

a. Kedudukan Manusia di Muka Bumi

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. (Q. S Az-Zariyat :56)*

Dalam Surah Az-Zariyat ayat 56 dari Al-Qur'an menggarisbawahi tujuan mendasar penciptaan manusia dan jin, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Manusia diberikan kedudukan yang mulia sebagai khalifah (wakil) Allah di permukaan bumi. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang tinggi dalam menjalankan kehidupan mereka di bumi ini. Tugas menjadi wakil Allah tidak hanya ditujukan kepada para nabi dan rasul yang diutus untuk menunjukkan jalan kepada umat manusia, tetapi juga kepada seluruh umat manusia. Ini berarti setiap individu, terlepas dari status sosial atau politik mereka, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan peran sebagai khalifah Allah di bumi ini.

Dalam konteks kehidupan sosial dan politik, prinsip ini mengingatkan bahwa pemimpin, baik itu raja, presiden, gubernur, atau pejabat lainnya, memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap orang-orang yang mereka pimpin atau layani. Mereka harus mengelola urusan negara dan masyarakat dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang diamanatkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, setiap manusia, terutama pemimpin, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tugas dan kekuasaan mereka digunakan untuk kebaikan bersama, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia. Ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan kita, baik dalam kapasitas individual maupun sebagai pemimpin, haruslah sesuai dengan ajaran Allah SWT dan memberikan manfaat bagi umat manusia serta menjaga keadilan dan keberkahan

di bumi ini. “Sebagaimana hadits Nabi yang dikutip oleh Hamka “...Semua kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggung jawab atas kepemimpinannya...”. (Muhammad A. Al-Buraey, 1979)

Dalam Al-Qur'an ayat ke-30 surat al-Baqarah dijelaskan bahwa Allah menyampaikan kepada para malaikat niat-Nya untuk mendirikan Khilafah di muka bumi. Oleh karena itu, Dia menciptakan Adam sebagai manusia pertama yang menjadi Khalifah. Khalifah adalah orang yang bertanggung jawab melaksanakan kehendak khalifah. (Hamka, 2015)

كَلِمَاتٍ فِيهَا خَلِيفَةٌ × قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا رَأْسًا وَآخِرًا لِمَنْ لَا نَعْلَمُ مَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ × قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا
لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an, khususnya QS. 2:28-29, mengajak manusia untuk merenungkan keagungan penciptaan Allah SWT serta peran dan tujuan hidup manusia di dunia ini. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari ketiadaan, diberi kehidupan, kemudian akan kembali kepada-Nya untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Pemikiran Buya Hamka menyoroti esensi dari ayat-ayat tersebut, yang menunjukkan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk menghargai dan bersyukur atas anugerah hidup yang diberikan oleh Allah SWT. Selain itu, manusia juga diminta untuk memahami tujuan penciptaan mereka, yaitu sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi ini.

Dalam konteks ayat tersebut, Allah memberitahukan kepada para malaikat tentang kehendak-Nya untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Para malaikat, dengan kebajikan mereka, bertanya kepada Allah tentang alasan penciptaan manusia yang rentan untuk membuat kerusakan dan kekacauan di bumi. Namun, Allah menjelaskan bahwa Dia lebih mengetahui rencana-

Nya, termasuk rencana-Nya untuk menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Pemahaman ini menekankan bahwa manusia, sebagai khalifah Allah di bumi, memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keadilan, kedamaian, dan keharmonisan di dunia ini. Mereka juga diminta untuk menggunakan kekuasaan dan kebebasan yang diberikan oleh Allah dengan bijaksana, agar tidak menimbulkan kerusakan dan kekacauan di bumi ini.

b. Sumber Kekuasaan Politik

Tafsiran yang disampaikan oleh Buya Hamka mengenai kekuasaan yang berasal dari Allah SWT sangatlah relevan dengan konsep keislaman tentang hakikat kekuasaan. Ayat yang pertama dari Surat Al-Mulk secara jelas menyatakan bahwa segala bentuk kekuasaan berasal dari Allah SWT, dan manusia diberikan kedudukan sebagai pemimpin atau khalifah di bumi ini untuk menjalankan kekuasaan tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.

Pemahaman ini menekankan bahwa manusia, dalam menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh Allah, haruslah bersikap rendah hati dan menyadari bahwa kekuasaan yang mereka pegang hanyalah titipan dari Allah SWT. Dengan menyadari asal-usul kekuasaan, manusia diharapkan untuk menggunakan kekuasaan tersebut dengan penuh kebijaksanaan, keadilan, dan tanggung jawab, serta selalu mengacu pada ajaran dan aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, pemahaman ini juga mengingatkan bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan kekuasaan mereka di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, mereka harus bertindak dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab moral dan spiritualnya sebagai khalifah di muka bumi. (Hamka, 2015)

تَبْرَكَ الَّذِي يَدِيَهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dalam ayat lain Allah Swt berfirman dalam quran surah Al-Imran: 26 yang berbunyi;

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ × بِيَدِكَ الْخَيْرُ × إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Katakanlah (Muhammad), "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.

Buya Hamka mengenai Asbabun Nuzul ayat tersebut menggambarkan situasi politik dan sosial yang terjadi pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, hal ini menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan di kalangan beberapa kelompok, termasuk di antaranya adalah golongan Yahudi. Para bangsawan Arab dan kekuatan politik lainnya, seperti Kerajaan Romawi dan Persia, tidak mengakui kekuasaan baru yang muncul dari tanah Arab dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Mereka mungkin merasa terancam oleh kehadiran kekuatan baru ini yang dipimpin oleh seorang nabi yang berasal dari kalangan Quraisy, sebuah suku Arab yang tidak dianggap sebagai bangsawan atau berada di tingkat sosial yang rendah. Namun, meskipun dianggap sebagai suku yang biasa, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kekuasaan yang besar dan berwibawa sebagai Rasulullah. Kekuasaan yang dimilikinya bukanlah kekuasaan dunia semata, tetapi kekuasaan moral, spiritual, dan keagamaan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Arab pada saat itu.

Penjelasan ini menyoroti dinamika politik dan perlawanan terhadap kekuasaan yang baru muncul pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak diakui oleh kekuatan politik yang ada pada saat itu, kekuasaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berhasil menegakkan kebenaran, memerangi kebatilan, dan membawa perubahan yang besar dalam sejarah manusia dan peradaban Islam. (Hamka, 2015)

Kekuasaan yang diperoleh oleh Rasulullah SAW bukanlah tujuan utama dari perjuangan beliau, tetapi menjadi konsekuensi dari keberhasilan dalam menyebarkan ajaran Islam dan memenangkan hati serta dukungan masyarakat. Kekuasaan tersebut bukanlah untuk kepentingan pribadi atau sekadar untuk dominasi politik, melainkan sebagai alat untuk menegakkan agama dan kebenaran,

serta memastikan bahwa nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Tentangan dan perlawanan yang dihadapi Rasulullah SAW dari pihak Bani Israil, raja Persia, dan kekuatan lainnya juga mencerminkan tantangan besar yang dihadapi dalam menyebarkan ajaran Islam. Namun, Rasulullah SAW terus berjuang dengan tekad dan kegigihan untuk memperjuangkan kebenaran dan membebaskan manusia dari kegelapan kehidupan yang dipenuhi dengan kesyirikan dan ketidakbenaran. Dengan penekanan pada nilai-nilai spiritual dan moralitas, Rasulullah SAW memberikan contoh yang kuat tentang bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan untuk kebaikan dan kemanusiaan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kekuasaan semata. Hal ini merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya menggunakan kekuasaan dengan bijaksana dan bertanggung jawab, serta selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama yang membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. (Hamka, 2015)

Penjelasan Buya Hamka tentang kekuasaan Allah dalam ayat yang Anda sebutkan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang konsep kekuasaan menurut ajaran Islam. Dalam konteks ini, kekuasaan dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT, yang memberikan dan mencabut kekuasaan sesuai dengan kehendak-Nya. Tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak kecuali Allah SWT sendiri. Ayat tersebut menggambarkan bahwa Allah SWT memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu di langit dan di bumi, dan Dia memberikan kekuasaan kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya. Sebaliknya, Allah juga bisa mencabut kekuasaan tersebut dari siapa pun yang dikehendaki-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan manusia hanyalah sementara dan bergantung sepenuhnya pada kehendak Allah SWT.

Dalam pandangan Islam, kekuasaan bukanlah tujuan akhir dalam hidup, melainkan merupakan amanah yang harus dipergunakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Kekuasaan dapat menjadi ujian bagi manusia, dan Allah SWT mencoba dan menguji hamba-Nya dengan memberikan atau mencabut kekuasaan sesuai dengan kebijaksanaan-Nya. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan bahwa segala kebaikan berasal dari Allah SWT. Manusia hanya menerima kebaikan tersebut sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, setiap kebaikan

yang diterima manusia seharusnya menjadi alasan bagi mereka untuk bersyukur kepada Allah dan menggunakan kekuasaan yang diberikan-Nya untuk kebaikan bersama dan kemanusiaan.

Pemahaman ini mengajarkan manusia untuk rendah hati dan tidak sombong dalam menjalani kehidupan, serta untuk selalu mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Allah SWT. Dengan memahami konsep kekuasaan menurut ajaran Islam, manusia diharapkan dapat menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan keberadaan Allah SWT sebagai sumber segala kekuasaan dan kebaikan. *"Sesungguhnya Engkau atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa."* (ujung ayat 26). (Hamka, 2015)

c. Janji Allah Kepada Orang-orang Yang Beriman

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Al-qur'an. Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nur: 55 yang berbunyi;

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسِّرَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَيُؤْتِيَهُم مِّنَ الْأَمْوَالِ مِمَّا حَبَّوبُوا إِلَيْهِمْ يُؤْتُونَهُمْ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ الْغَنِيِّمْ وَفِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن كَانَ يَتَذَكَّرُ أَلَّا يَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.

Hamka menjelaskan, bahwa Ayat 55 ini merupakan inti tujuan perjuangan hidup. Dan inilah janji dan pengharapan yang telah diberikan oleh Tuhan bagi setiap Mu min dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keyakinan di permukaan bumi ini. Hamka menyatakan :

"Bahwa pokok pendirian mesti dipegang teguh dan sekali-kali jangan dilepaskan,

baik keduanya atau salah satu di antara keduanya. Pertama ialah iman atau kepercayaan. Kedua amal saleh, perbuatan baik, bukti dan bakti. Kalau keduanya telah berpadu satu, amal saleh timbul dari iman dan iman menimbulkan amal, terdapatlah kekuatan pribadi, baik orang-seorang ataupun pada masyarakat Mu min itu". (Hamka, 2015)

Kepada setiap orang yang memegang teguh pendirian itu atau masyarakat seperti inilah Allah menjanjikan bahwa mereka akan diberikan warisan kekuasaan di atas bumi ini. Kendali bumi ini akan diserahkan ke tangan mereka, sebagaimana dahulu pun warisan yang demikian telah pernah pula diberikan kepada umat yang terdahulu dari mereka.

d. Pemimpin Harus Adil

Pengertian tentang keadilan (قáÚĪá) dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan umat Muslim. Keadilan dalam konteks Islam mencakup lebih dari sekadar keadilan dalam hukum atau peradilan, tetapi juga mencakup keadilan dalam segala aspek kehidupan manusia.

Secara bahasa, al-adl (قáÚĪá) merujuk pada keadaan yang lurus, jujur, dan tidak berbelok dari kebenaran. Ini mengimplikasikan sebuah sikap yang seimbang, di tengah-tengah antara ekstrem kelebihan (ifrat) dan kelalaian (tafrit). Seseorang dianggap berlaku adil jika ia mampu menjaga keseimbangan di antara hal-hal tersebut.

Dalam Al-Qur'an, tegaknya keadilan ditekankan secara kuat. Umat Muslim diajak untuk menjadi penegak dan pembela keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kekuasaan. Artinya, pemimpin dan pemerintah diharapkan untuk menjalankan kekuasaan mereka dengan adil dan seimbang, tanpa penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Top of Form Allah berfirman dalam Al-qur'an surah Shad: 26 yang berbunyi;

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: (Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

“Hai Daud! Sesungguhnya Kami telah menjadikan engkau khalifah di muka bumi.” (pangkal ayat 26). Buya Hamka tentang arti dan makna khalifah mengandung pemahaman yang dalam tentang peran manusia di muka bumi. Khalifah, dalam konteks ini, tidak hanya merupakan pemegang kekuasaan politik, tetapi juga merupakan pelaksana tugas-tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai pengganti atau representatif-Nya di bumi.

Dalam pandangan Hamka, Adam sebagai manusia pertama dianggap sebagai Khalifah Allah yang pertama di muka bumi. Sebagai contoh, Daud, sebagai raja Bani Israil, juga dianggap sebagai Khalifah Allah yang melanjutkan tugas Adam sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Dalam menjalankan peran sebagai Khalifah, Hamka menekankan pentingnya menjalankan keadilan dalam memutuskan hukum dan kebijakan. Hukum yang benar adalah hukum yang adil, dan keadilan merupakan fondasi utama dalam menjalankan kekuasaan. Hal ini ditekankan dalam pesan Allah kepada manusia untuk memutuskan perkara dengan benar dan tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu atau emosi pribadi.

Buya Hamka mengingatkan bahwa jika seorang pemimpin atau penguasa memutuskan perkara berdasarkan hawa nafsunya, bukan berdasarkan keadilan dan kebenaran, maka hal tersebut dapat menyesatkan dirinya dan juga orang-orang yang dipimpinnya dari jalan Allah. Penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dan tidak berlandaskan keadilan dapat mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang, dan orang-orang yang terjerumus ke dalam kesesatan moral akan menghadapi hukuman yang berat di akhirat. Dengan demikian, pesan Hamka menegaskan bahwa kekuasaan adalah ujian yang berat, dan pemimpin atau penguasa harus menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran akan amanah yang diberikan oleh Allah. Kekuasaan bukanlah alat untuk memenuhi

hawa nafsu atau kepentingan pribadi, tetapi merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

2. Urgensi Pemikiran Politik Hamka Terhadap Umat Islam Indonesia

Buya Hamka memiliki kontribusi yang signifikan dalam dunia politik Islam Indonesia. Tidak hanya melalui karya-karyanya yang menggagas pemikiran politik Islam, tetapi juga melalui keterlibatannya dalam kegiatan politik praktis dan organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Sarekat Islam, dan Masyumi. Pemikiran politik Hamka, sebagaimana tergambar dalam karyanya, memiliki relevansi yang kuat dengan konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Pandangan politiknya yang berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah menggarisbawahi pentingnya menjaga agama, menerapkan syariat Islam, serta memberikan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa membedakan suku, agama, atau ras.

Hamka menekankan bahwa politik yang adil merupakan manifestasi dari keadilan Allah dan ajaran-Nya. Pemikiran politiknya secara teologis menawarkan alternatif yang berbeda dari pemikiran politik Barat yang sekuler. Sementara pemikiran politik Barat cenderung memisahkan agama dari urusan politik, Hamka menekankan pentingnya memadukan prinsip-prinsip Islam dalam tata kelola negara. Hal ini relevan dengan konteks Indonesia, di mana Pancasila sebagai dasar negara juga mencerminkan nilai-nilai teologis. Dengan mempelajari dan menerapkan pemikiran politik Hamka, umat Islam di Indonesia diharapkan dapat menghindari pemikiran politik sekuler Barat yang dapat mengancam nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemikiran politik Hamka juga mencerminkan kritik terhadap pemisahan agama dan negara yang diterapkan oleh sebagian negara Barat. Contohnya adalah kemunduran Turki yang dianggap Hamka sebagai hasil dari mengadopsi model politik sekuler Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran politik Hamka tidak hanya relevan dalam konteks Indonesia, tetapi juga dapat menjadi panduan bagi umat Islam di berbagai belahan dunia untuk membangun sistem

politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Perubahan tersebut mencakup pengubahan masjid menjadi museum, penggantian adzan dalam bahasa Turki, dan terjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa Turki dengan alasan nasionalisme. Ini menunjukkan bagaimana pemisahan agama dan negara dapat mengarah pada sekularisasi yang mendalam, di mana nilai-nilai agama dianggap semakin terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan dasar negara yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa, nilai-nilai keagamaan memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan kebijakan dan peraturan negara. Hamka, dengan pemikirannya yang mengakui pentingnya hubungan antara negara dan agama, menekankan bahwa keduanya harus saling mendukung dan memberi pengaruh satu sama lain.

Dalam pandangan Hamka, hubungan yang harmonis antara agama dan negara akan membawa keadilan bagi rakyat. Dalam konteks Indonesia, system pemerintahan yang demokratis yang berdasarkan pada kehendak rakyat sejalan dengan nilai-nilai agama dapat membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pemikiran Hamka tentang pentingnya nilai-nilai agama dalam tata kelola negara memiliki kesesuaian dengan system pemerintahan Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan keberagaman. Hal ini menunjukkan relevansi pemikiran Hamka dengan konteks Indonesia, di mana nilai-nilai agama masih memiliki peran penting dalam pembangunan dan tata kelola negara, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan bagi semua warga negara. Pemikiran politik Hamka, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Hakim dan M.Thalhah. Beberapa pemikiran politik Hamka tersebut adalah :

- a. Syura
- b. Negara dan Kepala Negara
- c. Tentang Agama dan Negara
- d. Hubungan Internasional

KESIMPULAN

Pemikiran Hamka tentang landasan kekuasaan politik dalam Al-Qur'an mengarahkan perhatian kepada beberapa ayat yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab atas kekuasaan. Ayat-ayat tersebut memberikan panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin atau penguasa, serta dalam interaksi sosial dan ekonomi. Menurut Hamka, pemimpin atau penguasa dalam Islam harus menyadari bahwa kekuasaan yang mereka miliki hanyalah titipan dari Allah SWT. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan kekuasaan tersebut dengan adil, amanah, dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keamanan harus menjadi panduan dalam pengambilan keputusan politik dan tindakan administratif.

Pemikiran politik Hamka memberikan urgensi bagi umat Islam Indonesia untuk memahami bahwa nilai-nilai Islam harus menjadi landasan dalam keterlibatan politik. Dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits, pemimpin Muslim diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan keadilan, serta menghindari pemisahan antara politik dan agama yang cenderung dilakukan dalam pemikiran politik Barat yang sekuler. Pemikiran Hamka dapat menjadi pedoman bagi umat Islam Indonesia yang ingin terlibat dalam politik, sehingga mereka dapat mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan tugas politik mereka, serta memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, pemikiran politik Hamka dapat menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan sesuai dengan ajaran Islam.

Pustaka Acuan

Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana.2015).

Hamka, *Sejarah Umat Islam: Pra-kenabian hingga Islam di Nusantara*, (Jakarta:Gema Insani.2016).

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasa: Kontekstualisasi Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group.2018).

- Katimin, *Politik Islam : Studi Tentang Azaz Pemikiran, dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat Islam*, (Medan:Perdana Publishing.2017).
- Katimin, *Politik Masyarakat Pluralis: Menuju Tatanan Masyarakat Berkeadilan dan Berperadaban*,(Bandung: Citapustaka Media Perintis.2010).
- Moleong, Lexy. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011).
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari pandangan Al qur an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994).
- Q.S. Al Baqarah.2:185.
- Sirayudin, Ahmad, “ *Konsep Etika Sosial Hamka : Dalam era Kekinian*,(Skripsi: Jurusan Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015).
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam : Siyasa Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2014).
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Syahrul, Achmad, *Penafsiran Hamka Tentang Surya Dalam Tafsir Al-Azhar*,(Skripsi: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2009).